

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG DALAM MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA

Natta Sanjaya¹, Amelia Faizatul Uma², Putri³, Vivi Anggraeni⁴, Putri Emelia
Samantha⁵, Rahma Nur Annisa⁶

nattasanjaya@untidar.ac.id¹, ameliafaiza294@gmail.com², anakputri12345@gmail.com³,
anggraenivivi78@gmail.com⁴, putrisamanda52@gmail.com⁵, rahmanurannisa00@gmail.com⁶

Universitas Tidar

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, penelitian ini melibatkan empat informan yang dipilih secara purposive. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber sebagai uji keabsahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kota Magelang telah mengembangkan program terstruktur yang mencakup pemetaan risiko, pelatihan mitigasi, simulasi evakuasi, dan sosialisasi inklusif bagi masyarakat umum maupun penyandang disabilitas. Faktor pendukung utama meliputi kerangka regulasi yang memadai dan jaringan kemitraan lintas sektor, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan personel, anggaran, dan distribusi program yang belum merata. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan model sosialisasi inklusif yang lebih sistematis.

Kata Kunci: Inklusivitas Kebencanaan, Kesiapsiagaan Bencana, Program Pencegahan.

ABSTRACT

This study examines the role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Magelang City in enhancing community preparedness through disaster prevention and preparedness programs. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation involving four purposively selected informants. Data analysis followed the interactive model of Miles and Huberman, with source triangulation applied to ensure validity. The findings reveal that BPBD Magelang City has developed structured programs encompassing risk mapping, mitigation training, evacuation simulations, and inclusive socialization targeting both the general public and persons with disabilities. Key enabling factors include an adequate regulatory framework and cross-sectoral partnerships, while limiting factors involve personnel shortages, budget constraints, and uneven program distribution. This study recommends strengthening institutional capacity and developing a more systematic and standardized model of inclusive disaster socialization.

Keywords: Disaster Preparedness, Disaster Prevention Program, Inclusivity In Disaster Management.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap ancaman bencana di dunia, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Letak geografis kepulauan Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yakni Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik, menjadikan wilayah ini memiliki potensi tinggi terhadap kejadian gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, hingga tsunami. Kondisi tersebut diperparah oleh perubahan iklim global yang semakin memperburuk frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi di berbagai daerah. Sebagai respons atas tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengamanatkan pembentukan kelembagaan khusus penanganan bencana di setiap tingkatan pemerintahan. Kota Magelang sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari ancaman bencana, khususnya banjir dan tanah longsor yang kerap melanda kawasan pemukiman padat.

Dalam konteks ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang mengemban fungsi strategis sebagai ujung tombak upaya disaster risk reduction di tingkat daerah. Secara normatif, BPBD diberikan mandat untuk melaksanakan serangkaian kegiatan mulai dari fase prabencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan, hingga fase pascabencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi (Atmaja et al., 2024). Di antara berbagai fungsi tersebut, penguatan kesiapsiagaan masyarakat melalui program pencegahan menjadi aspek yang paling krusial karena bersifat proaktif dalam meminimalisasi risiko sebelum bencana terjadi. Kajian teoritis mengenai kesiapsiagaan bencana (disaster preparedness) menjelaskan bahwa kemampuan suatu komunitas dalam merespons ancaman bencana sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan warga dalam menghadapi situasi darurat. Teori community capacity building menegaskan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya intervensi kelembagaan yang terstruktur dari pemerintah daerah. Dalam kerangka ini, sosialisasi kebencanaan menjadi instrumen utama yang digunakan BPBD untuk menjembatani kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat (Andini, 2024).

Sosialisasi yang efektif tidak hanya mentransfer pengetahuan teknis tentang mitigasi, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif (collective awareness) yang mendorong partisipasi aktif warga dalam sistem penanggulangan bencana (Andini et al., 2024). Lebih jauh, BNPB melalui Pedoman Nomor 3 Tahun 2024 secara eksplisit menetapkan bahwa sosialisasi penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya penyampaian informasi yang bertujuan mengenalkan ancaman bencana, meningkatkan kesadaran, dan membentuk sikap tanggap masyarakat secara berkelanjutan. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji peran BPBD dalam konteks kebencanaan. (Amarullah, 2023) menunjukkan bahwa program pencegahan dan mitigasi BPBD di Kabupaten Serang belum berjalan efektif karena keterbatasan pada aspek ketepatan sasaran dan pengukuran hasil program. Demikian pula (Sunarti & Aryani, 2024) menemukan bahwa kolaborasi antarlembaga dalam manajemen kesiapsiagaan bencana masih terbatas pada fase tanggap darurat dan belum optimal pada fase pencegahan.

Sementara itu, (Arman, 2023) secara spesifik mengidentifikasi bahwa BPBD di berbagai daerah menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan penanggulangan bencana yang inklusif, terutama dalam memberikan intervensi yang tepat bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan adanya research gap yang signifikan, yakni belum tersedianya kajian empiris yang secara komprehensif mendokumentasikan praktik nyata BPBD dalam menyelenggarakan sosialisasi kesiapsiagaan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas penyandang disabilitas, di tingkat kota. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, penelitian ini mengambil lokus di Kota Magelang yang selama ini belum menjadi subjek kajian spesifik mengenai peran BPBD dalam program pencegahan dan kesiapsiagaan. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan dimensi inklusivitas dengan menyoroti upaya sosialisasi BPBD terhadap masyarakat penyandang disabilitas sebagai kelompok yang selama ini paling rentan namun paling sedikit mendapat perhatian dalam literatur kebencanaan lokal. Ketiga, penggunaan metode penelitian berbasis pengalaman magang langsung di BPBD Kota Magelang memberikan data primer yang bersifat first-hand observation, sehingga mampu mengungkap praktik kelembagaan secara lebih otentik

dibandingkan penelitian berbasis dokumen semata.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang diselenggarakan oleh BPBD Kota Magelang dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat? (2) Bagaimana pelaksanaan sosialisasi kesiapsiagaan bencana oleh BPBD Kota Magelang terhadap masyarakat umum dan masyarakat penyandang disabilitas? (3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BPBD Kota Magelang dalam menjalankan program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Magelang; (2) Menganalisis pelaksanaan sosialisasi kesiapsiagaan bencana oleh BPBD Kota Magelang terhadap masyarakat umum maupun masyarakat penyandang disabilitas; (3) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas program pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kota Magelang.

Adapun manfaat penelitian ini terbagi atas dua dimensi. Secara teoretis, hasil penelitian diharapkan memperkaya khazanah ilmu administrasi publik dan manajemen bencana, khususnya terkait implementasi program kesiapsiagaan inklusif di level pemerintah kota. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi BPBD Kota Magelang dalam menyempurnakan strategi sosialisasi dan program pencegahan bencana, sekaligus menjadi referensi bagi BPBD daerah lain yang ingin mengembangkan model sosialisasi yang lebih inklusif dan menjangkau kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan mengeksplorasi dan menggambarkan secara mendalam peran BPBD Kota Magelang dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna, proses, dan dinamika kelembagaan secara holistik dan kontekstual, yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan kuantitatif semata. Sebagaimana ditegaskan oleh (Creswell & Creswell, 2022) penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan interpretasi data, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena sosial yang dikaji. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui tiga teknik utama, yakni in-depth interview (wawancara mendalam), observasi partisipatif, dan dokumentasi.

Wawancara mendalam dilakukan secara langsung terhadap informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan berdasarkan relevansi posisi dan kompetensi mereka terhadap fokus penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari: (1) RH, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Magelang; (2) DW, selaku Staf Pelaksana Program Sosialisasi dan Edukasi Kebencanaan; (3) AP, selaku Koordinator Lapangan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat; dan (4) SN, selaku perwakilan masyarakat peserta program sosialisasi. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen resmi, laporan kegiatan, serta regulasi yang relevan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana (Sunarti, 2024). Proses pengumpulan dokumentasi dilaksanakan melalui komunikasi dan kontak langsung dengan informan selama berlangsungnya proses wawancara pada bulan Juni 2026, yang juga didukung oleh kegiatan magang peneliti secara langsung di lingkungan BPBD Kota Magelang.

Demi sepenuhnya menjunjung komitmen etika penelitian, khususnya terkait asas anonymity (anonimitas) dan kerahasiaan identitas, seluruh data yang berkaitan dengan profil informan maupun instansi tempat mereka bertugas direkam dan disimpan secara mandiri oleh peneliti. Informasi tersebut selanjutnya dialihkan ke dalam bentuk kodefikasi informan di dalam laporan penelitian, tanpa melampirkan identitas visual maupun dokumen fisik yang dapat mengungkap privasi informan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (conclusion drawing and verification). Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan hasil wawancara antara pejabat struktural BPBD, staf pelaksana, dan masyarakat peserta program sosialisasi, guna memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan (Creswell & Creswell, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kota Magelang

Sebagai institusi yang diberi mandat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BPBD Kota Magelang telah mengembangkan sejumlah program pencegahan dan kesiapsiagaan yang dirancang secara sistematis dan terstruktur. Berdasarkan temuan di lapangan, program-program tersebut mencakup penyusunan peta risiko bencana, penyelenggaraan pelatihan mitigasi bagi komunitas, pembentukan kelompok siaga bencana di tingkat kelurahan, serta pelaksanaan simulasi evakuasi secara periodik. Program-program ini sejalan dengan amanat normatif yang tertuang dalam Pedoman BNPB Nomor 3 Tahun 2024, yang menegaskan bahwa upaya pencegahan dan kesiapsiagaan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat (BNPB, 2024). Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Magelang menegaskan arah kebijakan program tersebut dalam wawancara yang dilakukan pada 5 Juni 2026:

"Program pencegahan yang kami jalankan tidak hanya soal mitigasi fisik, tetapi juga membangun kesadaran warga sejak dini. Kami sudah memetakan seluruh wilayah rawan bencana dan dari situ kami turunkan program pelatihan yang disesuaikan dengan karakteristik ancaman di tiap kelurahan. Ini kami lakukan rutin setiap tahun agar masyarakat tidak hanya tahu, tetapi benar-benar siap." (Wawancara dengan RH, 5 Juni 2026)

Pernyataan tersebut mengonfirmasi bahwa pendekatan yang digunakan BPBD Kota Magelang bersifat context-sensitive, yakni menyesuaikan intervensi program dengan profil ancaman spesifik di masing-masing wilayah. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian (Effendi, 2023) yang menemukan bahwa BPBD Kota Balikpapan menerapkan tiga peran utama dalam fase prabencana, meliputi sosialisasi peta rawan bencana, penyelamatan darurat, serta rehabilitasi pascabencana. Namun demikian, penelitian di Kota Magelang menunjukkan kedalaman yang lebih spesifik karena program pencegahannya telah mencakup pembentukan kelompok siaga bencana berbasis kelurahan sebagai struktur grassroots yang mengakar di komunitas.

Lebih lanjut, kapasitas kelembagaan menjadi variabel penentu dalam efektivitas program. Temuan lapangan menunjukkan bahwa BPBD Kota Magelang menghadapi tantangan dalam dimensi investing in human dan investing in network sebagaimana dikonseptualisasikan dalam teori pengembangan kapasitas kelembagaan. Hal ini senada dengan penelitian (Huda et al., 2025) terhadap BPBD Kabupaten Jepara, yang menemukan bahwa keterbatasan jumlah personel bersertifikasi dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal menjadi hambatan struktural yang signifikan. Koordinator lapangan kegiatan kesiapsiagaan masyarakat BPBD Kota Magelang menjelaskan kondisi tersebut dalam

wawancara 10 Juni 2026:

"Kami akui keterbatasan personel menjadi tantangan nyata. Saat program berlangsung bersamaan di beberapa titik, kami harus membagi tim yang ada semaksimal mungkin. Tapi kami terus berupaya melibatkan unsur relawan terlatih agar program tetap berjalan meskipun sumber daya kami terbatas." (Wawancara dengan AP, 10 Juni 2026)

Kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis operasional semata, melainkan mencerminkan permasalahan struktural yang berakar pada kapasitas kelembagaan (*institutional capacity*) yang belum sepadan dengan kompleksitas ancaman bencana di lapangan. Dalam perspektif teori pengembangan kapasitas yang dikemukakan oleh (Khofiya & Sumayya, 2025), dimensi *investing in human* menjadi fondasi yang tidak dapat diabaikan, karena tanpa sumber daya manusia yang memadai secara kuantitas maupun kualitas, program pencegahan dan kesiapsiagaan yang telah dirancang dengan baik sekalipun akan menghadapi hambatan serius dalam tahap implementasinya. Meskipun demikian, respons adaptif yang ditunjukkan BPBD Kota Magelang dengan cara mengintegrasikan unsur relawan terlatih ke dalam struktur pelaksanaan program patut diapresiasi sebagai strategi *resource mobilization* yang efektif di tengah keterbatasan.

Pendekatan ini mencerminkan kemampuan kelembagaan untuk memanfaatkan jaringan sosial (*social network*) yang ada di masyarakat sebagai sumber daya komplementer yang memperluas kapasitas operasional tanpa harus bergantung sepenuhnya pada penambahan personel formal. (Putri, 2025) dalam penelitiannya terhadap BPBD Kabupaten Jombang menemukan bahwa pembentukan forum komunikasi antar relawan dan pelibatan aktif komunitas relawan dalam program kebencanaan terbukti menjadi salah satu inisiatif paling strategis dalam memperkuat kapasitas respons di tingkat lokal, khususnya ketika sumber daya kelembagaan resmi mengalami keterbatasan. Temuan tersebut memperkuat relevansi strategi yang diterapkan BPBD Kota Magelang sebagai pendekatan yang tidak hanya pragmatis, tetapi juga selaras dengan prinsip *community-based disaster risk reduction* yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap fase penanggulangan bencana.

2. Pelaksanaan Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana kepada Masyarakat Umum dan Penyandang Disabilitas

Sosialisasi kesiapsiagaan bencana yang diselenggarakan BPBD Kota Magelang dilaksanakan melalui dua jalur utama: sosialisasi kepada masyarakat umum dan sosialisasi inklusif yang secara khusus menyasar komunitas penyandang disabilitas. Sosialisasi kepada masyarakat umum dilakukan melalui forum warga, penyebaran materi edukasi berbasis leaflet dan media sosial, serta pelibatan aktif kader kelurahan sebagai agen perubahan di tingkat lokal. Adapun sosialisasi kepada penyandang disabilitas dirancang dengan pendekatan komunikasi yang adaptif, melibatkan pendamping dan juru bahasa isyarat, serta menggunakan media yang dapat diakses oleh berbagai kelompok difabel. Staf pelaksana program sosialisasi dan edukasi kebencanaan menjelaskan mekanisme tersebut dalam wawancara 12 Juni 2026:

"Kami tidak bisa menyamakan cara penyampaian untuk semua orang. Untuk teman-teman difabel, kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan organisasi difabel setempat agar materi yang kami sampaikan benar-benar bisa dipahami. Ada yang menggunakan bahasa isyarat, ada yang pakai gambar dan ilustrasi yang lebih sederhana. Ini tidak mudah, tapi ini yang benar." (Wawancara dengan DW, 12 Juni 2026)

Pengakuan tersebut mencerminkan komitmen kelembagaan terhadap prinsip *inclusive disaster management* yang selama ini menjadi kekosongan dalam literatur kebencanaan lokal. (Setiawan, 2024) dalam kajiannya secara eksplisit mengidentifikasi bahwa BPBD di berbagai daerah masih menghadapi hambatan serius dalam memberikan intervensi yang

tepat bagi penyandang disabilitas. Temuan di Kota Magelang menunjukkan langkah yang lebih progresif dibandingkan mayoritas daerah lain, meskipun implementasinya masih bergantung pada kapasitas jaringan mitra eksternal. Dari sisi masyarakat umum, efektivitas sosialisasi terbukti memberikan dampak yang terukur. Perwakilan masyarakat peserta program sosialisasi menyampaikan pengalamannya dalam wawancara 17 Juni 2026:

"Setelah ikut sosialisasi dari BPBD, saya jadi lebih tahu apa yang harus dilakukan kalau ada bencana. Dulu saya tidak tahu sama sekali jalur evakuasi di sekitar sini. Sekarang sudah ada titik kumpul yang jelas dan warga sekitar juga sudah sama-sama tahu." (Wawancara dengan SN, 17 Juni 2026)

Pengalaman yang diungkapkan informan ini menggambarkan pergeseran dari kondisi informasi asimetri menuju kesadaran kolektif (*collective awareness*) yang menjadi indikator keberhasilan sosialisasi bencana sebagaimana dikemukakan oleh (Tasman, 2023). Hal ini juga mendukung temuan dalam penelitian mereka terhadap BPBD Surabaya, yang menyimpulkan bahwa edukasi bencana yang terstruktur terbukti mampu meningkatkan pemahaman kognitif, mengubah sikap, serta membangun keterampilan praktis dalam menghadapi situasi darurat. Dalam konteks Kota Magelang, efek serupa teramati pada tingkat komunitas kelurahan yang telah menerima sosialisasi secara berkesinambungan. Sosialisasi berbasis sekolah turut menjadi komponen penting yang dikembangkan BPBD Kota Magelang. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang diimplementasikan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan memberikan saluran strategis untuk menjangkau generasi muda. Temuan ini selaras dengan penelitian yang menunjukkan bahwa forum komunikasi antar pemangku kepentingan, termasuk institusi pendidikan, menjadi instrumen efektif dalam membangun kapasitas kesiapsiagaan secara lintas generasi.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Efektivitas program pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kota Magelang dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang saling berinteraksi. Dari sisi pendukung, terdapat tiga elemen utama yang memperlancar pelaksanaan program. Pertama, adanya regulasi yang memadai, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Pedoman BNPB Nomor 3 Tahun 2024, yang memberikan landasan hukum dan operasional yang jelas bagi seluruh aktivitas kelembagaan. Kedua, dukungan jaringan mitra yang mencakup organisasi relawan, organisasi difabel, dan lembaga pendidikan yang memperluas jangkauan program di luar kapasitas internal BPBD. Ketiga, komitmen pemerintah daerah Kota Magelang yang tercermin dari alokasi anggaran dan kebijakan yang mendukung penguatan ketangguhan bencana di tingkat komunitas.

Sebaliknya, terdapat pula faktor penghambat yang secara sistematis membatasi optimalitas program. Tasman (tanpa tahun) dalam penelitiannya terhadap BPBD Kota Padang menemukan empat hambatan struktural yang relevan: hasil program yang belum maksimal, jangkauan program yang belum menyeluruh, keterbatasan anggaran, dan kekurangan sarana pendukung. Hambatan-hambatan yang identik ditemukan pula di Kota Magelang, sebagaimana ditegaskan oleh staf pelaksana dalam wawancara 12 Juni 2026:

"Anggaran yang tersedia memang belum sepenuhnya mencukupi untuk menjangkau seluruh kelurahan secara merata. Ada kelurahan yang sudah sering mendapat sosialisasi, ada yang baru sekali. Ini yang menjadi pekerjaan rumah kami agar distribusi program bisa lebih merata ke depannya." (Wawancara dengan DW, 12 Juni 2026)

Hambatan distribusi yang tidak merata ini juga dikonfirmasi oleh (Bria, 2025) dalam kajian penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Malaka, yang menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan kekurangan dana menjadi penghambat utama kinerja BPBD dalam menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses. Situasi serupa berlaku dalam

konteks Kota Magelang, khususnya dalam upaya menjangkau komunitas penyandang disabilitas yang tersebar di berbagai wilayah dengan aksesibilitas yang beragam.

Di sisi lain, aspek koordinasi lintas sektor menjadi variabel kritis yang turut menentukan keberhasilan program. (Sudarman, 2026) dalam penelitian mereka terhadap BPBD Kota Parepare menemukan bahwa koordinasi logistik yang efektif melalui mekanisme pendataan dan verifikasi yang sistematis berkontribusi signifikan terhadap kualitas respons bencana. Dalam konteks pencegahan di Kota Magelang, koordinasi serupa dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil menjadi enabler utama yang memungkinkan sosialisasi inklusif terlaksana meskipun dengan sumber daya kelembagaan yang terbatas. Peningkatan koordinasi antar lembaga, penguatan kesadaran masyarakat, serta dukungan anggaran yang memadai merupakan tiga prasyarat fundamental agar program kesiapsiagaan bencana dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa BPBD Kota Magelang telah menjalankan fungsi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana melalui program yang terstruktur, meliputi pemetaan risiko, pelatihan mitigasi berbasis kelurahan, simulasi evakuasi, dan sosialisasi inklusif yang menyasar masyarakat umum maupun penyandang disabilitas. Sosialisasi yang diselenggarakan terbukti mampu mendorong pergeseran dari kondisi informasi asimetri menuju kesadaran kolektif yang lebih terorganisir di tingkat komunitas. Secara implikatif, temuan ini menegaskan bahwa efektivitas program kesiapsiagaan tidak semata ditentukan oleh kelengkapan regulasi, melainkan oleh kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya manusia, dan kualitas koordinasi lintas sektor yang dibangun secara konsisten. Keterbatasan personel dan distribusi program yang belum merata menjadi tantangan struktural yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui sertifikasi kebencanaan, peningkatan alokasi anggaran sosialisasi, perluasan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, serta pengembangan model sosialisasi inklusif yang lebih sistematis dan terstandarisasi agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, dapat terlayani secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarullah, S. (2023). Challenges Of Local Disaster Management Agencies (Bppbd) In Realizing Inclusive Disaster Management In Indonesia. 06001, 1–9.
- Andini, I. F. (2024). Peran Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Manajemen Kesiapsiagaan Bencana di RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Khatulistiwa (JKMK)*, 11(02), 68–80.
- Andini, I. F., Widjanarko, B., & Suryawati, C. (2024). Peran Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Manajemen Kesiapsiagaan Bencana di RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kesmas (Kesehatan Masyarakat) Khatulistiwa*, 11(2), 68–80.
- Arman, R. (2023). Potensi Bencana Banjir Di Wilayah Pusat Kegiatan Lokal Desa Karimun , Kecamatan Karimunjawa. *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi (GeoJPG)*, 2(1), 15–21.
- Atmaja, S., Arianto, B., & Darmawan, E. (2024). Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Kabupaten Karimun Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 4.
- Bria, J. K. I. (2025). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Malaka Pada Tahun 2024. *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 3, 139–156.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.

- Effendi, A. R. (2023). Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pada Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Alam Di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. 1–12.
- Huda, M., Nisa, F., & Syafi, M. (2025). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Peningkatan Kesadaran Bencana Pada Kalangan Relawan Di Kabupaten Jombang. 9(2), 1–14.
- Khofiya, N., & Sumayya, S. A. (2025). Peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Kesiapsiagaan pada Zona Megathrust Indonesia. 7(April), 1–22.
- Putri, S. R. (2025). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Surabaya Dalam Meningkatkan Kesadaran Bencana Melalui Edukasi Mitigasi Di Sekolah Dasar. 6(1), 88–104. <https://doi.org/10.15642/publique.2025.6.1.88-104>
- Setiawan, A. (2024). Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kota Balikpapan. IDENTIFIKASI Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindungan Lingkungan, 10(1), 42–48.
- Sudarman, D. (2026). Peran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Dan Respons Bencana Di Kota Parepare. DedikasiMU (Journal of Community Service), 8, 28–34.
- Sunarti, I., & Aryani, L. (2024). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang Dalam Tahap Pencegahan Dan Kesiapsiagaan. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(1), 492–496.
- Tasman, H. T. (2023). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Pencegahan Bencana Banjir Di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. 1–11.